

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menampilkan sikap saling menghargai terhadap kemajemukan masyarakat merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat modern yang demokratis. Masyarakat majemuk memiliki kedudukan yang setara tidak ada prioritas antar suku, ras, etnis, maupun agama walaupun mereka memiliki budaya dan aspirasi yang berbeda-beda. Manusia dikodratkan menjadi makhluk yang harmoni. Perbedaan-perbedaan dalam masyarakat seharusnya menjadi alasan untuk menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi toleransi.

Kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan modal yang sangat menentukan terwujudnya sebuah bangsa yang Bhinneka tunggal ika. Menurut Setiadi (2006: 153-154), segala bentuk kesenjangan harus didekatkan, segala keanekaragaman dipandang sebagai kekayaan bangsa milik bersama. Kemajemukan masyarakat seharusnya dapat menjadikan rakyat Indonesia hidup dalam keharmonisan, namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Secara relatif sering terjadi konflik antar kelompok satu sama lain. Realitas ini harus diterima dengan sikap keterbukaan dan kedewasaan agar konflik tersebut tidak menggoyahkan persatuan Indonesia.

Salah satu penyumbang kontribusi dalam keberagaman di Indonesia adalah Agama. Menurut Setiadi (2006: 148), agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Menurut Thouless sebagaimana dikutip Setiadi (2006: 149), agama terpusat pada Tuhan atau Dewa sebagai ukuran untuk

menentukan yang tak boleh diabaikan. Agama merupakan hal yang penting di Indonesia, terbukti dengan adanya berbagai agama yang diakui di Indonesia. Diskriminasi tidak terjadi begitu saja, namun ada beberapa faktor penyebabnya. Menurut Setiadi (2006: 155), faktor yang mempengaruhi terjadinya diskriminasi adalah persaingan yang ketat dalam bidang ekonomi, tekanan dan intimidasi dari kelompok yang dominan, ketidakberdayaan masyarakat kecil atas intimidasi yang mereka dapatkan.

Penyebab lain terjadinya berbagai konflik adalah problematika diskriminasi dalam masyarakat. Menurut Setiadi (2006: 154), diskriminasi adalah tindakan yang melakukan pembedaan terhadap seseorang atau kelompok, golongan, status sosial, agama, kondisi fisik, dan lain-lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip HAM yang memandang secara universal dan tidak membeda-bedakan. Pasal 281 ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Permasalahan lain yang terjadi adalah adanya disintegrasi bangsa. Menurut Setiadi (2006: 156), faktor yang mendorong terjadinya disintegrasi bangsa adalah kegagalan kepemimpinan, krisis ekonomi yang parah dan berlangsung lama, krisis politik, krisis sosial, penurunan moral para aparat penegak hukum, dan investasi asing.

Konstitusi menjamin setiap warga negara untuk memeluk salah satu agama yang diakui di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang menyatakan: "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”. Berdasarkan uraian tersebut sudah jelas Indonesia menjamin secara yuridis setiap warganya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk harus ada sikap toleransi.

Salah satu hal yang dapat dijadikan solusi untuk memecahkan permasalahan masyarakat Indonesia yang majemuk adalah Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Setiadi (2006: 157), Bhinneka tunggal ika merupakan ungkapan yang menggambarkan masyarakat Indonesia majemuk dan heterogen. Bhinneka Tunggal Ika menekankan aspek persatuan dalam segala bidang tanpa membedakan. Terwujudnya Bhinneka tunggal ika tidak lepas dari kesadaran masyarakat akan hidup berdampingan dan memahami makna Bhinneka Tunggal Ika agar menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara.

Besarnya sikap toleransi dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika mengharuskan tiap individu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Penanaman rasa toleransi untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika ditanamkan pada anak sejak usia dini melalui pendidikan berbasis multikultural. Menurut Mahfud (2011: 185), dalam menghadapi pluralisme diperlukan paradigma baru yang lebih toleran yaitu paradigma pendidikan multikultural. Hal ini penting dilakukan untuk mengarahkan anak didik bersikap toleran terhadap masyarakat yang beragam. Pemerintah menyusun kurikulum mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan memasukkan materi

Bhinneka Tunggal Ika agar peserta didik dapat belajar menghargai perbedaan sejak dini.

Dusun Cetho merupakan daerah yang tingkat kemajemukan masyarakatnya cukup tinggi, terutama dalam hal perbedaan agama. Desa tersebut mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu, mereka menggunakan candi sebagai tempat pemujaan, tetapi ada juga warga yang memeluk agama lain misalnya Islam dan Nasrani. Masyarakat yang beragama Islam merayakan Idul Fitri dan Idul Adha dengan lancar, begitu pula dengan umat Nasrani yang merayakan Natal. Kemajemukan masyarakat Dusun Cetho tersebut harus disertai rasa toleransi yang tinggi, agar tidak terjadi konflik antar umat beragama. Toleransi masyarakat Dusun Cetho Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dari kehidupan mereka sehari-hari, walaupun mereka berbeda agama namun tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai warga negara Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan untuk diadakan penelitian tentang “Implementasi Toleransi Kebhinnekaan pada Masyarakat Majemuk di Dusun Cetho Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi toleransi kebhinnekaan di Dusun Cetho Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar?

2. Hambatan apa saja yang dihadapi terkait implementasi toleransi kebhinnekaan di Dusun Cetho Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi toleransi kebhinnekaan di Dusun Cetho Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sikap toleransi antar umat beragama di Dusun Cetho Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja terkait implementasi toleransi kebhinnekaan di Dusun Cetho Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.
3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi toleransi kebhinnekaan di Dusun Cetho Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan yang jelas. Manfaat atau kegunaan bisa bersifat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori baru mengenai Implementasi Toleransi Kebhinnekaan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Implementasi Toleransi Kebhinnekaan
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai Implementasi Toleransi Kebhinnekaan.
 - d. Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan yang bermanfaat bagi semua pihak berkaitan Implementasi Toleransi Kebhinnekaan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberi informasi dan masukan yang berguna bagi masyarakat pada umumnya mengenai arti penting toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

E. Daftar Istilah

1. Toleransi. Menurut Hasan dkk. (2010: 9), toleransi adalah sikap yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
2. Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
3. Masyarakat majemuk. Menurut Furnifal dalam Mahfud (2011: 84), masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur tatanan sosial yang hidup berdampingan.